

## PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (STUDI PADA KELOMPOK SADAR WISATA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

**Wulan Kusuma Dewi**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Email: wulankusuma154@yahoo.co.id

**Dedy Hermawan**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Email: hermawan.dedy75@yahoo.co.id

**ABSTRAK.** Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Selatan karena bukan hanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat Pemerintah, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat sebagai penggerak dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengdeskripsikan penguatan keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penguatan keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan sehingga Pokdarwis lebih cenderung pada tipologi partisipasi fungsional. Adapun faktor pendukung yaitu adanya dukungan stakeholder yaitu KPK (Komunitas Putera Krakatau) yang membantu Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata dan faktor penghambat yaitu kurangnya rasa kesadaran Pokdarwis untuk dapat mandiri dalam mengelola objek wisata, keterbatasan dana dan masalah lainnya.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Civil Society, dan Pariwisata.

**ABSTRACT.** Public participation in the public policy process is one of the principles of Good Governance by involving one actor of the civil society, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) which is in accordance with the Good Governance principles in which society is not only as a policy object but as a subject. This study aims to analyze and describe the reinforcement of Pokdarwis involvement in developing tourism in identifying the supporting and inhibiting factors of Pokdarwis in developing tourism in South Lampung Regency. This study used a qualitative approach with data collection techniques done by means of interview, observation and documentation. The results and discussion showed that the Tourism Awareness Group involvement in developing tourism is not carried out thoroughly by Pokdarwis in South Lampung Regency. There are 2 groups in Penengah Subdistrict and Rajabasa Subdistrict which have been involved in the planning stage to the utilization stage. However, two subdistricts of Bakauheni and Kalianda participated till the planning stage only. The supporting factors, included: supports from stakeholders and the government; while the inhibiting factors, included: lack of awareness from Pokdarwis, the limited fund and other problems.

**Keywords:** Participation, Civil Society, and Tourism

### PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan aktivitas seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain untuk berekreasi atau bertamasya. Banyaknya

para wisatawan yang berkunjung dari dalam negeri maupun luar negeri hanya untuk menikmati keindahan alam pada daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Pariwisata senantiasa berkembang dengan

dinamis seiring dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang secara lokal maupun global. Berbagai perubahan penting yang terjadi di dunia saat ini mau tak mau ikut mempengaruhi pariwisata dan segala aktivitasnya. Saat ini banyak daerah di beberapa wilayah Indonesia yang mulai tertarik untuk dapat mengembangkan industri pariwisata yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kekayaan alam. Selain itu sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat penting pada saat ini karena untuk meningkatkan devisa negara, membantu perekonomian negara, dan sebagai sektor yang berkelanjutan karena eksploitasi pariwisata tidak akan habis seperti eksploitasi alam dan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam yang semakin lama akan habis. Bahkan, dengan pengembangan pariwisata alam dan kebudayaan akan tetap lestari. Oleh sebab itu pemerintah mempunyai kesadaran untuk mengembangkan pariwisata agar dapat maju dan berkembang.

Pengembangan kepariwisataan merupakan daya tarik wisata yang dimiliki Negara yang dikenal baik oleh masyarakat nusantara maupun masyarakat mancanegara. Pengembangan kepariwisataan dapat di dayagunakan secara optimal, dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya, serta menghindarkan dari kerusakan-kerusakan, sehingga akan diperoleh manfaat bagi kehidupan. Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya mengembangkan pariwisata. Sehingga masyarakat diuntut untuk berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata karena bukan sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang memiliki destinasi wisata

alam dan bahari yang terkenal di Indonesia. Banyaknya objek wisata yang tersebar di 15 Kabupaten atau kota menjadikan para wisatawan nusantara dan wisata mancanegara yang datang untuk melihat keindahan wisata bahari di Provinsi Lampung. Salah satu objek wisata di Provinsi Lampung yang terkenal terdapat pada Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki letak yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera. Daerah ini dapat dikatakan sebagai muara dari Trans Sumatera atau sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan mengembangkan potensi di masing-masing desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan membangun peran *civil society* (masyarakat sipil) dan menggunakan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) serta penguatan komunitas yang membutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat yang secara khusus diharapkan mampu memperkuat posisi *civil society* sebagai mitra pembangunan, sekaligus mampu merespon kondisi dan permasalahan masyarakat yang sangat spesifik di desa dan daerah, strategi pemberdayaan masyarakat mampu mendorong terwujudnya konsep desentralisasi pembangunan dan kemandirian desa dengan mengembangkan potensi wisata.

Konsep *Good Governance* yang dalam diwakili oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan organisasi atau lembaga di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan. Pokdarwis memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mengembangkan kepariwisataan yang dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan bagi masyarakat di daerah wisata. Pokdarwis merupakan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik yang memegang peran penting terhadap suatu keberhasilan dalam mengembangkan pariwisata karena merupakan suatu aktor

yang terlibat langsung oleh wisatawan. Bentuk pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan di Lampung Selatan dilaksanakan melalui kerjasama antara instansi terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Pokdarwis yang bertujuan dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan sadar wisata bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait yang berada di desa wisata. Pokdarwis memiliki peran untuk menarik para wisatawan untuk dapat mengembangkan desanya menjadi kawasan pariwisata dan menjadi daya tarik terhadap wisatawan untuk dapat mengenalkan budaya yang terdapat pada masing-masing desa, serta memiliki peran dalam pembangunan kepariwisataan, meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai kepariwisataan bagi masyarakat.

Partisipasi Pokdarwis merupakan suatu hal yang penting dalam membantu pemerintah mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Akan tetapi, banyak faktor yang mempengaruhi Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan karena tidak semua Pokdarwis yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan.

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian ini, adalah :

1. Sejauh mana keterlibatan *Civil society* dalam membantu pemerintah mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan ?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat keterlibatan *civil society* dalam mengembangkan pariwisata di Lampung Selatan ?

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang *Good Governance*

#### 1. Definisi *Good Governance*

Menurut Sumarto (*Good Governance* adalah mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga yang mengatur sumber daya dalam memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta. *Governance* yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, *predictability* dan transparansi.<sup>11</sup>

Duadji menyebutkan bahwa *Good Governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dalam konteks *Good Governance*, *agent of development* tidak hanya pemerintah, tetapi juga *citizen*, masyarakat dan terutama sektor usaha atau swasta yang berperan dalam *governance*.<sup>12</sup>

### B. Tinjauan Tentang Partisipasi

#### 1. Pengertian partisipasi

Menurut Adisasmita, partisipasi merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam suatu program

11 Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa inovasi dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor: Jakarta Hal 15

12 Duadji, Noverman. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teoridan Problema Pelayanan Publik)*.

atau proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal.<sup>13</sup>

Adapun menurut Hadiwijoyo, partisipasi merupakan aktualisasi dari kesedian dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam program yang akan dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat perdesaan.<sup>14</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Partisipasi

Holil dalam Rukminto mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, yaitu sebagai berikut.

- a) Partisipasi dalam bentuk tenaga, Merupakan partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program .
- b) Partisipasi dalam bentuk uang, merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan uang tetapi tidak dipaksakan, yang di berikan sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.
- c) Partisipasi dalam bentuk harta benda, merupakan bentuk partisipasi dengan menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.<sup>15</sup>

## 3. Tingkatan Partisipasi

Wilcox dalam Theresia, Dkk mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu

- a. Memberikan informasi (*Information*)
- b. Konsultasi (*Consulation*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implelementasi ide dan gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- d. Bertindak bersama (*Acting together*), tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya. Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*), kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.<sup>16</sup>

4. Faktor Pendukung Partisipasi menurut Najib dalam Huraerah (2011:121-122) yang juga turut menjadi faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut.

- a) Siapa penggagas partisipasi, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau LSM. *Non-governmentstakeholders* berpeluang untuk lebih lanjut.
- b) Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat.
- c) Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan LSM yang memegang kendali cenderung lebih berhasil

13 Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu Hal 34

14Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu Hal 18

15 Rukminto, Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas :dari ADMINISTRATIO*  
p-ISSN: 2087-0825/e-ISSN: 25486977

*Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press. Hal 21

16 Theresia, Aprillia, Dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta Hal 202

dikarenakan cenderung mengetahui permasalahan, kondisi dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibandingkan pihak luar.

d) Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya. Jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.

e) Kultural, masyarakat memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.

f) Politik, kepentingan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keragaman dan demokratis.

g) Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (teintegrasi dalam sistem pemerintahan di daerah).

h) Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.

i) Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, LSM, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.

j) Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama.

k) Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga).<sup>17</sup>

## 5. Faktor Penghambat Partisipasi

Soetrisno dalam Theresia (2015:210), menyebutkan faktor-faktor

yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain sebagai berikut.

a. Belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan.

b. Pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter.

## C. Tinjauan Tentang Tinjauan tentang Civil Society (Masyarakat Sipil)

### 1. Definisi Civil Society

Menurut Rosyada, dkk *civil society* merupakan sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability*serta ketulusan atau *transparency system*.<sup>18</sup>

### 2. Ciri-ciri masyarakat *civil society*

Diamond dalam Hadiwijoyo (mengemukakan 5 (lima) ciri masyarakat sipil yang dapat dibedakan dari masyarakat politik. Kelima ciri tersebut yaitu *pertama*, masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan public bukannya tujuan privat. *Kedua*, masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan Negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas Negara atau mendapat posisi dalam Negara dan berusaha tidak mengendalikan politik secara menyeluruh. *Ketiga*,

<sup>17</sup> Huraerah, Abu. 2011. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers Hal 101

<sup>18</sup> Rosyada, Dede, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarnegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Medika Hal 240

masyarakat sipil mencakup pluralism dan keberagaman. Artinya, organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralistic. Keempat, masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok-kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mencakup kepentingan berbeda-beda pula.<sup>19</sup>

### 3. Fungsi Civil Society

Menurut Hadiwijoyo, *civil society* mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

a. *Civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran Negara sebagai pelayan *public*.

b. *Civil society* melakukan aktivitas yang belum atau tidak dilakukan Negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas.

c. *Civil society* sebagai kekuatan tandingan Negara.<sup>20</sup>

### D. Tinjauan Tentang Pariwisata Berbasis Masyarakat

Menurut Hadiwijoyo CBT (*Community Based Tourism*) merupakan pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, dalam membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran

mereka dan belajar mengenai masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal.<sup>21</sup>

### E. Tinjauan Tentang Pariwisata

#### 1. Definisi Pariwisata

Menurut A.J Muljadi kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali, dan berputar-putar. Sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi, pariwisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.<sup>22</sup>

#### 2. Objek dan Daya Tarik Wisata

Menurut Hadiwijoyo, obyek dan daya tarik adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan.<sup>23</sup>

#### 3. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Menurut A.J. Muljadi, sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya, tergantung dari wisatawan yang datang.

19Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu Hal 83

20Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu Hal 71

21 A. J, Muljadi. 2009. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Hal 8  
ADMINISTRATIO  
p-ISSN: 2087-0825/e-ISSN: 25486977

22 Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu 49

23 A. J, Muljadi. 2009. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 13

Jenis-jenis sarana pokok kepariwisataan menurut A.J. Muljadi , antara lain:

- 1) Perusahaan perjalanan (*Travel Agent* atau Biro Perjalanan Jasa)
- 2) Perusahaan Angkutan Wisata
- 3) Perusahaan Akomodasi
- 4) Perusahaan makanan dan minuman
- 5) Perusahaan daya tarik wisata dan hiburan.
- 6) Perusahaan cinderamata atau *art shop*.

Berdasarkan pengertian diatas, sarana prasarana merupakan suatu fasilitas yang diberikan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup>

#### 4. Pengembangan Pariwisata

Munasef dalam Hadiwijoyo menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan.<sup>25</sup>

Marpaung dalam Hadiwijoyo menyatakan bahwa hal yang diperhatikan dalam pengembangan suatu daya tarik wisata yang potensial harus dilakukan penelitian, inventarisasi dan evaluasi sebelum fasilitas wisata dikembangkan. Hal ini penting agar perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan pasar potensial dan untuk menentukan pengembangan yang tepat dan sesuai.<sup>26</sup>

#### METODE PENELITIAN

24 Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu Hal 57

25 Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu Hal 58

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana keterlibatan *civil society* dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan
  - a. Keterlibatan Pokdarwis terhadap perencanaan dalam suatu kegiatan.
  - b. Keterlibatan Pokdarwis terhadap pelaksanaan dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung selatan.
  - c. Keterlibatan Pokdarwis memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari suatu kegiatan.
- 2 . Faktor pendukung dan penghambat Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Lampung Selatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### PEMBAHASAN

##### A. Keterlibatan Civil Society Dalam Membantu Pemerintah Mengembangkan Pariwisata Di Lampung Selatan

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan bahwa terdapat 4 Fokus dalam penelitian ini, yaitu keterlibatan Pokdarwis dalam tahap perencanaan, keterlibatan Pokdarwis dalam tahap pelaksanaan, keterlibatan Pokdarwis dalam pemanfaatan hasil serta faktor pendukung dan penghambat Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten

26 Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Lampung Selatan. Adapun pembahasan mengenai “Partisipasi *Civil Society* Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Pada Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Lampung Selatan)” akan di deskripsikan sebagai berikut.

### **1. Keterlibatan Pokdarwis Dalam Tahap Perencanaan Suatu Kegiatan**

Dalam kegiatan perencanaan, Pokdarwis di Kabupaten Lampung Selatan diberikan penyuluhan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung dalam bentuk sosialisasi di 4 Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kecamatan Penengahan, Bakauheni, Rajabasa, dan Kalianda penyuluhan tersebut diberikan agar masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kegiatan penyuluhan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan kritik terhadap pengembangan objek wisata yang terdapat di masing-masing objek wisata di Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya, setelah diberikan penyuluhan, Pokdarwis di Kabupaten Lampung Selatan di undang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang berguna untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan *skill* dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah diberikan pelatihan, kemudian Pokdarwis di Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Rajabasa melakukan kegiatan musyawarah untuk merencanakan suatu kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah maupun kegiatan yang dilakukan Pokdarwis secara internal. Pokdarwis yang terlibat dalam kegiatan musyawarah untuk merencanakan suatu kegiatan yaitu terdapat pada Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Penengahan.

Dalam musyawarah tersebut KPK berperan serta dalam memantau kegiatan Pokdarwis dengan memberikan pengarahan terhadap pariwisata. Namun dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan Pokdarwis di Kabupaten Lampung Selatan, tidak semua Pokdarwis turut berperan serta dalam melaksanakan kegiatan musyawarah. Pokdarwis yang belum melaksanakan kegiatan musyawarah yaitu Pokdarwis Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Bakauheni. Ketidaktifan Pokdarwis tersebut karena masih rendahnya rasa kesadaran Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata serta masih terdapat masalah-masalah internal seperti masalah sengketa lahan pada objek wisata yang menyebabkan Pokdarwis tidak turut aktif dalam melanjutkan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.

### **2. Keterlibatan Pokdarwis Dalam Tahap Pelaksanaan Suatu Kegiatan**

Pokdarwis di Kabupaten melaksanakan tugas berdasarkan SK Bupati dengan tujuan sebagai peningkatan kepariwisataan yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Munasef dalam Hadiwijoyo (2011:57), pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. Kegiatan Pokdarwis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh Pokdarwis di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Penengahan. Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan perbaikan jalan, jembatan, Wc maupun Pondokan untuk para wisatawan. Yang bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung di objek wisata di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk melaksanakan kegiatan Pokdarwis dibantu oleh masyarakat setempat untuk bersama-sama melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan Pokdarwis untuk menyambut para wisatawan dengan melaksanakan kegiatan kerajinan yang dilakukan oleh Pokdarwis di Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Penengahan melaksanakan dengan memanfaatkan limbah kayu dan batok kelapa untuk diolah kembali menjadi cinderamata yang cantik seperti perahu-perahuan, gantungan. Hal tersebut merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha sebagai peningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam hal ini, Pokdarwis sudah melaksanakan kegiatan yang berasal dari Dinas Pariwisata maupun kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh Pokdarwis di Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Penengahan. Untuk Kegiatan yang dilakukan, Pokdarwis sudah melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong dalam melaksanakan tugasnya. Pokdarwis telah memotivasi masyarakat untuk meningkatkan lingkungan dan daya tarik wisata setempat demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wisatawan. Namun, masih terdapat Pokdarwis yang belum melaksanakan kegiatan dalam mengembangkan pariwisata yaitu Pokdarwis Kecamatan Kalianda dan Pokdarwis Kecamatan Bakauheni . Hal tersebut karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka untuk tidak aktif yaitu karena tidak adanya dana dan kesadaran untuk melaksanakan kegiatan.

### **3. Keterlibatan Pokdarwis Terhadap Pemanfaatan Hasil Dalam Suatu Kegiatan.**

Program unggulan Bupati Kabupaten Lampung Selatan untuk membangun daerahnya dalam pembangunan kepariwisataan. Partisipasi dalam tahap ini dapat dirasakan hasilnya oleh Pokdarwis dan para wisatawan untuk memanfaatkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan Pokdarwis dari tahap perencanaan hingga

tahap pelaksanaan. Dalam hal ini hasil dari pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh Pokdarwis di Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Rajabasa telah di rasakan oleh Pokdarwis dan wisatawan yang mengunjungi wisata. Manfaat yang dirasakan Pokdarwis yaitu menambah ilmu dan pengetahuan terhadap Pokdarwis untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan, serta menambah perekonomian masyarakat sekitar dalam bidang ekonomi seperti usaha kuliner dan usaha kerajinan yang diperjuangkan untuk para wisatawan yang mengunjungi objek wisata yang terdapat di objek wisata Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan setelah adanya Pokdarwis yaitu memberikan manfaat terhadap pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan karena Pokdarwis dibentuk sebagai pengelola langsung objek wisata di Kabupaten Lampung Selatan. Pokdarwis memanfaatkan website yang berguna dalam mengenalkan ke wisatawan terhadap objek wisata di Kabupaten Lampung Selatan sehingga dapat dikenal oleh para wisatawan asing maupun lokal. Dengan adanya website pun dapat di manfaatkan Pokdarwis untuk mengenalkan objek wisata maupun fasilitas akomodasi yang berada di sekitar objek wisata seperti promo hotel, wisata paket *tour*, *homestay* dan restoran. Selanjutnya, hasil kegiatan infrastruktur dimanfaatkan oleh Pokdarwis untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan yang berkunjung agar wisatawan dapat merasa nyaman untuk menikmati keindahan diobjek wisata Kabupaten Lampung Selatan.

Dari keterlibatan Pokdarwis dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan hasil. Keterlibatan Pokdarwis dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan termasuk dalam partisipasi fungsional, partisipasi ini Menurut Hobley (1996) dalam Totok dan Soebiato (2012:88-90), masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai suatu tujuan, setelah

pembentukan kelompok pada tahap awal, masyarakat tergantung pada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya. Dalam hal ini, Pokdarwis di Kabupaten Lampung Selatan melakukan kegiatan perencanaan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, Kemudian setelah kegiatan tersebut Pokdarwis melaksanakan kegiatan musyawarah dalam pengembangan pariwisata untuk melaksanakan kegiatan secara mandiri. Berikut tabel keterlibatan Pokdarwis di Kabupaten Lampung Selatan.

## B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pokdarwis Dalam Melaksanakan Kegiatan

### 1. Faktor Pendukung

Dalam hal ini pengggagas partisipasi yaitu dukungan dukungan stakeholder yaitu KPK (Komunitas Putera Krakatau) yang membantu Pokdarwis dalam memproponi terbentuknya Pokdarwis serta membantu kegiatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, dukungan Pemerintah dalam membantu Pokdarwis mengembangkan pariwisata dalam memberikan Undang-Undang dan sosialisasi kepada Pokdarwis sehingga memberikan manfaat dalam pengetahuan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.

### 2. Faktor Penghambat

Pokdarwis di Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Kalianda memiliki rasa kesadaran yang kurang terhadap pariwisata yang terdapat di daerahnya. Hal tersebut karena Pokdarwis dalam melaksanakan kegiatan hanya menunggu dari atas tanpa memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Keterbatasan dana juga menjadi penghambat Pokdarwis untuk tidak berpartisipasi dalam mengembangkan

pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan karena terdapat Pokdarwis yang masih menunggu Pemerintah untuk memberikan dana tanpa memiliki kesadaran secara mandiri untuk mengembangkan pariwisata karena beralasan tidak ada dana. Kemudian, masalah internal yang di alami Pokdarwis dapat menyebabkan Pokdarwis menjadi tidak aktif dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan, hal tersebut terbukti dengan adanya sengketa lahan menyebabkan Pokdarwis tidak turut serta dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.

## KESIMPULAN

### 1. Keterlibatan *civil society* dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan

Keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 3 tahap yaitu, Tahap perencanaan, Pokdarwis sebagai undangan untuk kegiatan sosialisasi dari Dinas Pariwisata. Tahap Pelaksanaan, Pokdarwis melaksanakan kegiatan berdasarkan pelatihan yang diberikan Dinas Pariwisata dan berdasarkan inisiatif Pokdarwis. Tahap Pemanfaatan hasil, yang sudah dirasakan oleh Pokdarwis dalam peningkatan usaha masyarakat dan menjadi tuan rumah yang baik untuk para wisatawan. Namun hanya 2 Pokdarwis di Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Rajabasa yang sudah sampai tahap pemanfaatan hasil sedangkan untuk Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Kalianda hanya sampai tahap perencanaan yaitu hanya sebatas mengikuti undangan sosialisasi.

### 2. Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan *civil society* dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan

Adapun yang menjadi faktor pendukung Pokdarwis dalam

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan adalah dukungan stakeholder yang membantu kegiatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan dan dukungan Pemerintah dalam memberikan Undang-Undang dan sosialisasi kepada Pokdarwis sehingga memberikan manfaat dalam pengetahuan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Pokdarwis adalah masih rendahnya rasa kesadaran Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata, keterbatasan dana dan masalah lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- A. J, Muljadi. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Duadji, Noverman. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teoridan Problema Pelayanan Publik)*.

Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Huraerah, Abu. 2011. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers
- Rosyada, Dede, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarnegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Medika
- Rukminto, Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas :dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa inovasi dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor: Jakarta
- Theresia, Aprillia, Dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta